

Wahid Foundation dan PUSPA UIN Sunan Ampel Surabaya Adakan Webinar Bersama tentang Desa dan Universitas

Ditulis oleh Redaksi pada Kamis, 19 Agustus 2021

Peace-Talk Wahid Foundation

Desa dan Universitas; Bagaimana Promosi Toleransi Desa Damai bisa Bersinergi dengan Universitas?

Rabu, 18 Agustus 2021 | Pukul 09.30-12.45

Dr. Nabiela Naily, SSI., MHI., MA
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

M. Ilyas Rolis, M.Si.
Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Agama UIN Sunan Ampel Surabaya

Visna Vulovik
Koordinator Program Desa Damai Wahid Foundation

Penanggungjawab

- Perwakilan Desa Damai Sidomulyo, Batu
- Perwakilan Desa Damai Sumenep, Madura

Moderator

M. Helmi Umam, M.Si
Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Agama UIN Sunan Ampel Surabaya

zoom
[//bit.ly/PeaceTalkM21](https://bit.ly/PeaceTalkM21)
Meeting ID: 958 3459 2582
Passcode: wf2021

NARAHUBUNG: Ola (0822-5733-5675)

Tersedia sertifikat bagi semua peserta dan souvenir bagi 25 peserta terpilih

Jakarta-Guna menyebarkan dan mempromosikan *Peace Village Initiative* di universitas-universitas agar komunitas pemuda dapat dengan mudah mempelajari model-model Perdamaian dan menginspirasi mereka untuk membangun gerakan

perdamaian,

Wahid Foundation bersama dengan Pusat Studi Pancasila dan Agama/PUSPA Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menginisiasi webinar dengan tema “Desa dan Universitas; Bagaimana Promosi Toleransi Desa Damai bisa Bersinergi dengan Universitas?”

Kegiatan yang dilakukan secara daring melalui akun zoom meeting ini bertujuan untuk menyebarkan dan mempromosikan *Peace Village Initiative* di universitas agar komunitas pemuda, civitas akademika dan mahasiswa dapat dengan mudah mempelajari model-model Perdamaian dan menginspirasi untuk membangun gerakan perdamaian.

Sebagai pembicara pertama dalam webinar tersebut Visna Vulovik dari Koordinator Program Desa Damai Wahid Foundation menceritakan pengalamannya dalam mengelola program Desa Damai Wahid Foundation. Visna menjelaskan bahwa Desa Damai yang digagas sejak 2017 dilatarbelakangi oleh fakta bahwa sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi peningkatan radikalisme/terorisme atas nama agama.

“Wahid Foundation sejak 2017 menginisiasi program Desa/Kelurahan Damai di sejumlah wilayah di Indonesia. Desa Kelurahan Damai merupakan bagian dari gagasan besar yang berkontribusi pada Pencegahan atas isu ekstrimisme kekerasan (preventing violent extremism), sekaligus membangun ketahanan masyarakat (building resilient society). Upaya Wahid Foundation tersebut sejalan di tengah fakta bahwa hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi peningkatan radikalisme/terorisme atas nama agama,” ujar Visna (Rabu, 18/8).

Baca juga: [Ketika Santri Mengkaji Nano-Teknologi](#)

Visna mengungkapkan bahwa Wahid Foundation telah melibatkan banyak *stakeholder* untuk mendukung implementasi desa damai, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat. Meski demikian, masih minimnya dukungan universitas dalam inisiasi perdamaian di akar rumput mendorong Wahid Foundation melakukan kerjasama dengan dunia kampus.

“Padahal, salah satu bagian dari tri dharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat dan itu menyiratkan adanya koneksi antara kedua entitas tersebut. Karena itu,

Wahid Foundation, bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya Pusat Studi Pancasila dan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menginisiasi kegiatan Desa dan Universitas. Tujuannya jelas untuk mempromosikan *Peace Village Initiative* di kampus-kampus,” ungkap Visna.

Sementara itu, pembicara kedua, Dr. Nabila Laily Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berbicara tentang perempuan dan perdamaian. Perempuan memiliki potensi menjadi ibu, karena itu seringkali seorang perempuan akan menjadi “sekolah pertama” bagi pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu perempuan memiliki keunikan dalam potensi dan peran dalam upaya-upaya perdamaian di akar rumput.

“Kenapa perempuan memiliki keunikan potensi dan peran untuk perdamaian? Bisa jadi karena faktor Nurture Habit/budaya. Keterlibatan intensif di tengah kegiatan masyarakat seperti pengajian yang rutin, PKK, Posyandu, dan sebagainya lebih didominasi perempuan. Bahkan perempuan juga pendidik/sekolah awal bagi anak-anak,” ujarnya.

Baca juga: [Jelang Seratus Tahun NU, Santri Perkuat SDM bidang Sains dan Teknologi](#)

Terkait hal tersebut, Laily mengatakan bahwa perempuan dengan segala potensi dan fakta multiperan-nya justru bisa menjadi *front-lead* atau aktor utama membangun perdamaian.

Selain itu, terkait hubungan kampus dan masyarakat, Laily mengungkapkan bahwa kolaborasi dan berjejaring adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari saat ini untuk meningkatkan efektivitas.

“Kolaborasi dan berjejaring merupakan salah satu kunci penting demi penguatan ke depan. Penguatan jejaring dan kolaborasi pada dasarnya meningkatkan efektifitas karena orang, keahlian, pengetahuan, waktu, potensi dan aset semakin beragam dan berlimpah,” ungkap Lailya.

Di sisi lain, Laily juga menekankan bahwa kolaborasi antara kampus-masyarakat harus dikuatkan dengan menekankan aspek teoritis melalui riset yang umumnya dilakukan oleh kampus dan aspek praksis dengan terjun langsung terjun ke masyarakat. Dua hal ini tidak boleh dan perlu dikotomikan atau dipisahkan untuk berjalan sendiri-sendiri.

Adapun pembicara terakhir dari Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Agama UIN Sunan

Ampel Surabaya M. Ilyas Rolis, M.Si menyampaikan pembahasan tentang potensi bertahan dan berkembangnya desa damai di tengah-tengah masyarakat. Ilyas menjelaskan bahwa banyak orang hari telah menggeser paradigma mereka ke paradigma lokal. Ilyas menjelaskan bahwa desa damai bukan saja berbicara soal konflik atau soal perdamaian. Namun, dia lebih jauh berbicara soal keadilan.

Baca juga: "Pasukan Jahiliyah" di Internet Sangat Mengkhawatirkan

“Saya setuju bahwa desa damai Wahid Foundation tidak hanya berbicara soal konflik dan soal perdamaian saja. Namun, lebih jauh lagi, desa damai itu harus berbicara soal keadilan yang merupakan esensi dari perdamaian,” ujarnya.

Ilyas juga mengungkapkan bahwa perlu adanya pendefinisian ulang soal desa. Desa harus direbut kembali sebagai ruang sosial kultural masyarakat, bukan semata ruang unit terkecil dari pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, desa perlu dibangun kembali sebagai ruang kesejahteraan berbasis kekerabatan dan pertanian atau kekeluargaan.

Acara yang dimoderatori oleh M. Helmi Umam, M.Si, Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Agama UIN Sunan Ampel Surabaya ini dibuka oleh oleh Mujtaba Hamdi Direktur Eksekutif Wahid Foundation dan dihadiri 50 peserta. Acara ini juga dihadiri perwakilan Desa Damai Sidomulyo, Batu dan perwakilan Desa Damai Sumenep, Madura sebagai penanggap.